**ANALISIS KOORDINASI STAF SEKRETARIAT DEWAN DALAM
MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Ripzon Efendi, Lies Kumara Dewi
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ripzonefendi@gmail.com, lieskumaradewi13@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Koordinasi staf sekeretariat Dewan Kabupaten Pesisir Barat dalam menunjang fungsi DPRD dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat koordinasi staf sekretariat dewan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan koordinasi yang dilakukan oleh Staf Sekretariat Dewan Pesisir Barat belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan Staf Sekretariat. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi adalah kepemimpinan, kedisiplinan, kualitas Sumber Daya Manusia dan hambatan - hambatan koordinasi yaitu hambatan-hambatan dalam koordinasi Vertikal (structural) dan hambatan - hambatan dalam koordinasi fungsional. Saran dari penelitian ini adalah Staf Sekretariat DPRD hendaknya dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan agar dapat mewujudkan hubungan koordinasi yang baik dan harmonis antara staf Sekretariat dan Anggota DPRD.

Kata Kunci : koordinasi, faktor penghambat, fungsi DPRD

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how the Coordination Staff of the West Coast Regency Council in supporting the function of DPRD and to find out the inhibiting factors of the council secretariat staff coordination. The conclusion of this research are the results of this research states that the implementation of Coordination conducted by the Secretariat Staff of the West Coastal Council has not gone well it can be seen from the performance of the Secretariat Staff, the factors that influence Coordination are, Leadership, Discipline, Quality of Resources Humans, and Barriers to Coordination namely: Barriers in Vertical (structural) coordination and Barriers to Functional Coordination. The suggestions from this research is DPRD Secretariat Staff should be able to improve the ability to carry out the main duties and functions of each position, to be able to realize a good and harmonious coordination between the Secretariat staff and DPRD Members.

Keywords : coordination, inhibiting factors, function of DPRD

PENDAHULUAN

Organisasi yang berhasil mencapai dan melaksanakan tugas dan mencapai Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Staf yang diperbantukan adalah merupakan

pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi DPRD. Dalam hal membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap

DPRD, yang merupakan bagian dari pada sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kinerja yang dilakukan oleh staf Sekretariat DPRD memang sudah cukup baik, namun perlu diperhatikan terkait penempatan pejabat struktural dibawahnya agar sesuai dengan kapasitas dan kapabilitanya, selain itu perlu ada perubahan struktur sesuai dengan rasionalitas beban kerja yang ada pada setiap bagian di Sekretariat DPRD, sehingga Staf yang membantu kinerja Anggota DPRD benar-benar staf yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari latar belakang masalah diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut sesuai dengan kajian ilmiah. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang "*Analisis Koordinasi Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat*".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Koordinasi Staf Sekretariat Dewan Kabupaten Pesisir Barat dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Koordinasi Staf Sekretariat Dewan pada Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

METODE PENELITIAN

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Menetapkan identifikasi masalah dan merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian, Merumuskan kerangka pemikiran dan anggapan dasar atau hipotesis, mencari landasan teori dan menentukan metode penelitian, menetapkan populasi dan sampel, melakukan pengumpulan, pengolahan data serta melakukan analisa data, menarik kesimpulan dan me mberikan saran.

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dan keterbatasan kemampuan penulis serta waktu yang tersedia, maka dilakukan pembatasan masalah /ruang lingkup sebagai berikut: a) penelitian dilakukan hanya pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, b) Penelitian ini mencari Masukan dan pengetahuan dari Anggota DPRD dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Subjek penelitian adalah semua informasi baik sebagai perilaku utama maupun orang lain yang dapat memberikan dan memahami informasi mengenai data yang berkaitan yang diperlukan dalam penelitian ini. Subjek dan sumber Informasi dari Penelitian ini adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Bagian Hukum Perundang - Undangan Dan Dokumentasi, Bagian Umum yaitu Kasubag Tata Usaha Kepegawaian dan RT, Kasubag Humas

dan Protokol Kepala Bagian Keuangan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat Bapak Afril Liswar, SE Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Iqbal S, Sos Anggota Komisi III DPRD Pesisir Barat Bidang Kesra, Bapak Ali Yudiem, S.H Wakil Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat Bidang Hukum dan Pemerintahan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Wawancara, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan. Dimana didalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Staf Sekretariat Dewan Pesisir Barat dan Anggota DPRD Pesisir Barat. b) dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dll. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, gambar, film, dll.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Lestari, 2016) yang meliputi 4 komponen yaitu : a) Pengumpulan Data, b) Reduksi/ Penyederhanaan Data, c) Paparan/ Penyajian Data dan d) Verifikasi atau menarik Kesimpulan

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah, maka data-data hasil penelitian yaitu data dari data wawancara dan dokumentasi maka perlu teknik pemeriksaan keabsahan data .dalam penelitian ini maka dilakukan Cross Check data. Teknik Cross Check data digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Bungin, 2008 : 95)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan dokumentasi, sehingga Cross Check dilakukan dengan mengecek data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya Cross check dilakukan untuk mengecek balik derajat kepercayaan data berasal dari wawancara dengan dokumentasi , membandingkan antara hasil wawancara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian lainnya. dan antara dokumen yang satu dan Dokumen Lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta mengkoordinasi-kan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyediakan data/informasi sebagai bahan materi persidangan baik di forum internal DPRD maupun dengan pemerintah daerah. Data yang dipersiapkan antara lain: a) peraturan perundang-undangan

yang pernah ada dan yang sedang berlaku, b) potensi anggaran, sumber penganggaran, dokumen dan kebijakan anggaran, serta kebijakan pemerintah berkaitan dengan anggaran; keputusan dan ketetapan yang telah dilaksanakan serta pelaksanaannya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Komunikasi pada kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat sudah berjalan namun masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

1) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi dapat dilihat dari pelaksanaan koordinasi yang sudah berjalan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam Pengelolaan Tugas dan kinerja. Pelaksanaan dilakukan secara formal dan informal. Pemimpin SKPD sudah memberikan pengarahan dan menghimbau untuk selalu melaksanakan koordinasi lintas sektoral tidak hanya dalam pengelolaan tugas saja tetapi kegiatan lain yang sifatnya melibatkan SKPD terkait.

Sekretariat DPRD secara kelembagaan maupun para personilnya berusaha mengkoordinasikan kegiatan DPRD dan pemerintah daerah. Permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan anggota DPRD dicoba belum dipahami secara baik oleh setiap pegawai. Tugas Sekretariat DPRD dalam hal ini berupa penyediaan data dan dokumen serta draft Raperda yang disiapkan untuk memenuhi

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Pegawai di Sekretariat DPRD belum paham akan tugas-tugas dalam

membantu kami menjalankan tugas legislasi, menyusun aturan, menetapkan kebijakan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan, proses evaluasi dan pelaporan anggaran dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan serta dokumentasi anggaran dilakukan dengan baik dan berkordinasi dengan anggota DPRD selaku pengguna atau yang dilayani. Setiap pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran kegiatan (RKA), rencana anggaran dan perubahan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, dokumen perencanaan, anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, pengumpulan dan pengelolaan data guna penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD, pendampingan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan APBD dan perubahan APBD, pengelolaansurat menyurat, tatausahadan administrasi keuangan, penyiapan konsep Surat Perintah Pembayaran (SPP), penelitian anggaran dan penyiapan pelaksanaananggaran, penyusunan naskah dinas tentang saran dan pertimbangan terkait bidang keuangan.

2) Kompetensi Partisipan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat berusaha memberikan dukungan untuk pelaksanaan fungsi utama DPRD baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Usaha dimaksud diwujudkan dengan merumuskan visi yang menggambarkan mengenai apa yang

harus dicapai oleh organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat minimal lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam merumuskan kinerja sasaran organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat menerapkan manajemen administrasi dalam menyelenggara-kan tugas dan kewajiban untuk memudahkan pencapaian target kinerja.

Dalam hal penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan risalah; pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pembinaan administrasi oleh aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat melakukan strategi manajemen administrasi yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan kesekretariatan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan risalah; pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka

penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pembinaan administrasi oleh aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori Rasyid (2000) mengenai peran normatif Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah memfasilitasi aktivitas DPRD, dalam hal ini melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis; menyusun rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; pengaturan dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan menyingkronkan penyelenggaraan tugas; penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat; pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan. Sekretariat DPRD melakukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD dan pemerintah daerah; melakukan fungsi administrasi yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat DPRD. Tugas-tugas yang diperankan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat tersebut mencakup berbagai fungsi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam teori Abshar (2013:63-64). Terlaksananya peran Sekretariat DPRD tersebut telah memberikan dukungan yang baik untuk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD

Kabupaten Pesisir Barat. Temuan ini menyediakan bukti empiris untuk teori keagenan dari Oliveira & Filho (2017:596).

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Staf sebagai unsur pelayan dituntut dapat bekerja cepat dan teliti dalam menunjang Fungsi Anggota DPRD. Disamping itu, dukungan peralatan kantor yang memadai juga sebagai faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas mereka.

3) Kesepakatan, Komitmen, dan insentif koordinasi

Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

4) Kontinuitas Perencanaan

Tahap kontinuitas perencanaan adalah tahap kelanjutan setelah atau sebelum perencanaan dibuat. Kontinuitas perencanaan yaitu apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya feedback umpan balik dari obyek maupun subyek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan. Dalam penelitian ini, pihak Sekretariat selalu berkoordinasi dengan Anggota

DPRD. Jadi apabila ada Permasalahan – permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh sekretariat Dewan harus segera dikoordinasikan kepada Anggota DPRD, karena tidak bisa Sekwan langsung mengambil keputusan. Beberapa hari tidak selesai hal tersebut akan dirapatkan kembali pada porum untuk mencapai keputusan seksama.

Tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Mengusulkan untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iqbal, S.Sos anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Barat (wawancara, 02 Agustus 2019) koordinasi yang baik tentunya akan sangat membantu kinerja kami, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang harus kami lakukan maka tidak memungkinkan jika kami anggota DPRD akan mengerjakan semuanya sendiri-sendiri, sehingga kami membutuhkan Staf dalam membantu pekerjaan kami, dengan beratnya beban kerja yang ada, maka diperlukan koordinasi yang baik tentunya antara staf dengan atasan sehingga terjalinnya komunikasi dan informasi yang baik untuk tercapainya target dan kapasitas kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami.

Pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Handyaningrat (1989:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian

itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

2. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain :

- 1) Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- 2) Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- 3) Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- 4) Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- 5) Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
- 6) Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh

kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.

- 7) Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

Berdasarkan hasil penelitian berhasil tidaknya Sekretariat DPRD dalam menunjang Fungsi Anggota DPRD dapat dilihat dari indikator Koordinasinya. Adapun Indikator Koordinasi tersebut Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen, dan intensif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan. Beberapa hal tersebut menjadi tolak ukur berhasil atau berjalan tidaknya koordinasi yang dilakukan antara staf sekretariat dan anggota DPRD.

Untuk memahami secara nyata indikator - indikator koordinasi yang mempengaruhi tugas dan fungsi Anggota DPRD, maka berikut dijelaskan kondisi nyata Indikator - indikator tersebut antara lain:

- 1) Komunikasi Staf Sekretariat Dewan terhadap anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi. Katz dan Kahn (1966) (dalam Wayne, 2000:134) menyebutkan ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan yaitu: a) Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, b) Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan,

c) Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi, d) Informasi mengenai kinerja pegawai, e) Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas Alur Komunikasi

Dalam kaitannya dengan kegiatan suatu organisasi selalu berkaitan dengan komunikasi internal dan eksternal. Rosenblatt, et,all (1982 : 5) dalam yulianita menyatakan bahwa komunikasi organisasi dalam kegiatannya selalu meliputi dua ruang lingkup diantaranya : *internal communication* dan *eksternal communication*.(2005 : 92). Komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan Sedangkan komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara organisasi disatu pihak dengan pihak-pihak yang berada diluar organisasi. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi media komunikasi yang lebih dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam berkomunikasi secara efisien. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyediakan data/informasi sebagai bahan materi persidangan baik di forum internal DPRD maupun dengan pemerintah daerah. Tentunya dalam menjalankan tugas kesekretariatannya, harus di ikuti oleh komunikasi yang baik antar keduanya, baik komunikasi dari Atasan dengan staf, maupun komunikasi yang dilakukan oleh Pimpinan Sekretariat Dewan kepada Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Berikut ini merupakan Komunikasi yang dilakukan pada kantor DPRD Kabupaten Pesisir Barat diantaranya :

- 1 Intruksi: Komunikasi yang ada pada Sekretariat berupa penerapan gaya Komunikasi diantaranya ketika Sekwan mendapat informasi

dari anggota DPRD makan Sekwan akan menginstruksikan bawahannya untuk mempersiapkan apa yang menjadi bahan kebutuhan dari Anggota DPRD.

- 2) Konsultasi; merupakan pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Pentingnya dengan adanya konsultasi adalah akan didapat perbaikan-perbaikan terhadap suatu keputusan berdasarkan hasil keputusan bersama, dengan adanya Konsultasi akan membuat kinerja kita semakin mudah dan sangat terbantu, karena kita mendapatkan sebuah saran, ataupun tukar pikiran dalam menyelesaikan suatu masalah didalamnya.
- 3) Partisipatif: Menurut Keith Davis, partisipatif adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Penerapan gaya kepemimpinan mempengaruhi partisipasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam kenyataannya yang diterapkan secara optimal untuk gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Sekwan dalam memimpin bawahannya sangat berpengaruh pada kinerja stafnya. Kenyataan yang terlihat bahwa gaya kepemimpinan Sekwan berupa instruksi, konsultatif dan partisipatif sudah dijalankan secara optimal oleh aparat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu DPRD. Oleh karenanya gaya kepemimpinan yang teraktualisasikan dengan baik, tentu saja dapat

mempengaruhi peran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya sebagai perangkat daerah.

- 2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi antara Staf Sekretariat Dewan dengan Anggota DPRD

Kurangnya koordinasi dalam organisasi bisa berdampak sebagai berikut: 1) Petugas atau pejabat setiap satuan organisasi berselisih pada suatu wewenang atau bidang kerja yang masing-masing beranggapan sebagai termasuk dalam yuridiksinya. 2) Terdapat saling pelemparan tanggung jawab, disebabkan masing-masing merasa bahwa suatu wewenang atau bidang kerja tidak masuk dalam lingkungannya. 3) Terdapat keputusan yang ternyata dibuat dengan kurang sempurna karena tidak adanya keterangan lengkap di satuan organisasi yang berkaitan (dari tingkat bawahannya). 4) Akhirnya, gejala yang dapat dilihat juga yakni timbul banyak badan khusus atau satuan organisasi, 5) Nonstruktural, seperti: panitia, komisi, tim, satgas, dan sebagainya yang masing-masing berdiri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas yang pada nyatanya sudah bisa dicakup atau dimasukkan ke dalam susunan organisasi yang sudah ada.

- 3) Kompetensi Partisipan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat berusaha memberikan dukungan untuk pelaksanaan fungsi utama DPRD baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Usaha dimaksud diwujudkan dengan merumuskan visi yang menggambarkan mengenai apa yang harus dicapai oleh organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat minimal lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam merumuskan kinerja sasaran

organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat, ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat, kompetensi partisipan ditujukan untuk memotivasi semangat kerja para pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, dengan adanya target atau pencapaian yang harus di raih.

4) Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan yang ada dapat di lihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan. O'Reilly (1989: 11) menyebutkan komitmen karyawan pada organisasi sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi.

Steers dan Porter (1983:67) mengatakan bahwa suatu bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat dari sejauh mana individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan

sistem insentif dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan terhadap output yang dihasilkan, seperti yang dikemukakan oleh Jiwo Wangso dan Kartanto Broto Harsono (2003:101) adalah: "Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja karyawan". Selain insentif terhadap kinerja individu di dalam organisasi atas prestasinya. Terdapat juga sanksi atas kinerja individu yang tidak mencapai standar yang sudah ditetapkan. A. Budihardjo (1991: 7) memberikan pengertian sanksi sebagai suatu tanggapan positif atau negatif dari anggota kelompok sosial terhadap aktifitas atau perilaku pada bagian satu atau lebih dari anggotanya. Pelaksanaan sanksi bukan hanya sebagai petunjuk pada penyesuaian tentang nilai tetapi pada pengendalian sosial. Artinya, bahwa dengan sanksi seseorang akan selalu mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku

5) Kontinuitas Perencanaan

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya. Menurut Sondang P. Siagian (1994:108) Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Lutan (1988:300), "Umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan sesuatu tugas, perbuatan atau respons yang telah diberikan". Umpan

balik didapat setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan. Menurut Djaali dan Pudji (2008 : 1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator, yaitu: (1) transparansi informasi dibuka luas; (2) teknologi komunikasi digital digunakan optimal; (3) fungsi representasi dilaksanakan dengan baik. Dengan mengacu pada tiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Pesisir Barat sudah sebagai parlemen modern dan terbuka. Perlu ditingkatkan lagi peforma Lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota dewan maupun staf pendukung lainnya, guna menambah pengetahuan mengenai penggunaan dan peran sosial media sebagai sarana teknologi informasi yang dapat menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat. Parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator dalam implementasinya, yaitu: keterbukaan informasi, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi representasi. Transformasi menuju parlemen yang modern dan terbuka membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk dukungan infrastruktur. Mengacu pada data pertumbuhan dan Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat, kondisi tersebut dapat dijadikan momentum untuk memulai proses transisi menuju Parlemen Modern dan Terbuka. Untuk

dapat mencapai visi misinya, DPRD dihadapkan pada dua tantangan utama yang membutuhkan langkah taktis dan strategis dalam menyelesaikannya. Di satu sisi, DPRD harus terus membangun kepercayaan publik, namun disisi yang lain sebagai lembaga negara harus berkontribusi secara aktif bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan serta penguatan kelembagaan dalam kerangka konstitusional dan membangun kesadaran publik melalui investasi demokrasi jangka panjang. Dalam hal ini, tentu perlu dirumuskan target taktis dan target secara strategis. Setelah merumuskan masing-masing program yang akan mendorong kedua target tersebut, langkah selanjutnya dilaksanakan lewat penentuan target melalui *output* dan *outcome*. Bentuk hasil pelaksanaan dari masing-masing program tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, berimbangya informasi mengenai DPRD dan dokumen kajian strategis. Target taktis lebih ditujukan kepada bagaimana membentuk pemahaman masyarakat yang berimbang mengenai DPRD dan sebagai indikator penilaiannya digunakan metode media analisis. Sedangkan untuk target strategis yang hendak dicapai adalah dokumen kajian dan strategis dan implementasinya. Target taktis digunakan sebagai langkah untuk menyeimbangkan secara aktual dan cepat setiap berita yang berpotensi memberikan implikasi negatif terhadap kelembagaan DPRD. Target strategis untuk membangun kesadaran dalam jangka panjang secara menyeluruh. Alasan dari penggunaan kedua bentuk hasil pelaksanaan ini didasari oleh pembagian target berdasarkan jangka waktu. Target pertama dirancang sebagai target jangka pendek, sedangkan target berikutnya lebih diarahkan menjadi program jangka

panjang. Oleh karenanya, target strategis membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Sehingga dokumen kajian dan implementasinya merupakan persiapan dan *roadmap* yang akan membantu semakin terarahnya visi dan misi DPRD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Koordinasi Staf Sekretariat Dewan dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh staf sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat memang sudah berjalan dengan seharusnya, namun perlu ditingkatkan lagi dengan memahami perannya masing-masing sehingga peran staf sekretariat dewan dalam menjalankan Perannya staf sekretariat DPRD. Untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh staf sekretariat DPRD adalah dilihat dari :

1 Indikator Koordinasi Staf :

1) **Komunikasi:** Komunikasi sangat dibutuhkan di dalam koordinasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Staf Sekretariat Dewan adalah Jenis informasi yang digunakan didalam koordinasi Staf Sekretariat Dewan adalah jenis informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, dasar pemikiran, kebijakan dan praktik-praktik organisasi sesuai dengan SOTK yang menjadikan dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam komunikasi yang dilakukan belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

dalam koordinasi secara formal, mereka masih menggunakan surat menyurat untuk melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD.

- 2) **Kesadaran Pentingnya Koordinasi:** dapat dilihat dari pelaksanaan koordinasi yang sudah berjalan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan Pemerintahan. Pelaksanaan dilakukan secara formal dan informal.
- 3) **Kompetensi Partisipan:** yang terlibat di dalam koordinasi ini adalah pemimpin SKPD terkait pengarahan dan manajerialnya dan adanya rapat rumpun SKPD setiap bulan. Ahli teknis SKPD lebih sering berkoordinasi di lapangan karena lebih mengetahui secara teknis dan komprehensif adalah ahli teknis tiap-tiap bidang pada SKPD terkait. SDM memahami mengenai koordinasi tahapan pengelolaan Sistem Pemerintahan sesuai fungsi.
- 4) **Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi:** Bentuk kesepakatan dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Dengan adanya bentuk kesepakatan yang ada dirasa belum cukup untuk menjadi acuan yang kuat dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan secara intensif dan menyeluruh. Bentuk komitmen yang dilaksanakan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dalam pengelolaan Sistem

Pemerintahan Kemudian komitmen mereka juga di dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mengenai sanksi koordinasi belum diatur di dalam regulasi yang sudah ada hanya sekedar sanksi moriil.

- 5) Kontinuitas Perencanaan: Perencanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan dilakukan sesuai kebutuhan dengan melibatkan SKPD yang terkait. Perencanaan dilakukan di awal tahun. Hasil dari perencanaan berupa dokumen perencanaan dan regulasi. Umpan balik yang diberikan setiap SKPD terkait pengelolaan Sistem Pemerintahan memberikan input untuk proses perencanaan selanjutnya. Indikator Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 1) Membentuk Peraturan Daerah Bersama Kepala Daerah, 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur: 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, 4) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Fariad Ali. Syamsu Alam dkk 2012, *Studi Analisa Kebijakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Kambuaya, Onesimus, 2012, 27 *Kunci Sukses Meningkatkan Kapasitas Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*, Yogyakarta; CV.Aswaja Pressindo.
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta ; Gunung Agung.
- Talidziduhu Ndraha, 2002, *Kybernology1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Widjaja H.A.W. 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 99 ayat (1)
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 100 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 202 ayat (2)